

ABSTRAK
UPAYA PEMERINTAH KABUPATEN PATI DALAM MEMBERIKAN
PERLINDUNGAN HUKUM PRODUK TRASI JUWANA BERASARKAN UNDANG-
UNDANG MEREK NOMOR 15 TAHUN 2001

Produk trasi dapat dikategorikan sebagai merek dagang sebagaimana tercantum dalam pasal 1 angka 2 Undang-undang No.15 tahun 2001 tentang Merek yang memberikan penjelasan tentang arti dari merek dagang yaitu merek yang digunakan pada barang yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan barang-barang sejenis lainnya. Berdasarkan ketentuan tersebut maka pada dasarnya untuk memperoleh kepastian hukum atas merek, maka diperlukanlah pendaftaran atas merek dagang tersebut sebagai bukti bahwa orang yang mendaftarkan merek pertama kali tersebut memperoleh pengakuan bahwa merek yang dimilikinya memiliki kekuatan hukum.

Fokus dalam penelitian ini adalah tentang perlindungan hukum atas merek dagang Trasi Juana yang terkenal berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, selain perlu diketahui pula upaya apa saja yang telah dilakukan oleh pemerintah dalam mendorong masyarakat khususnya pengusaha trasi di Kabupaten Pati untuk mendaftarkan merek dagangnya.

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis empiris yaitu penelitian yang mencakup identifikasi hukum tidak tertulis dan penelitian terhadap efektifitas hukum tersebut. Penggunaan metode pendekatan Socio Legal dikarenakan dalam penelitian ini akan dipaparkan secara deskriptif yang mengidentifikasi segala masalah yang timbul berdasarkan keadaan sebenarnya di masyarakat. Mengkaji bekerjanya hukum di masyarakat dengan teknik wawancara dan studi dokumen.

Berdasarkan hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan upaya pemerintah Kabupaten pati dalam meberikan perlindungan hukum dalam pelaksanaan pendaftaran Merek di Kabupaten Pati antara lain sebagai berikut, 1) Mengajak instansi-instansi lain yang terkait seperti PPNS (Penyidik Pegawai Negeri Sipil), LIPI (Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia), Kepolisian, Kejaksaan untuk secara bersama-sama melakukan pembinaan tentang merek. 2) Memberikan pendidikan dan pembinaan pada seluruh tenaga staff secara internal Disperindag, sehingga menghasilkan tenaga menghasilkan tenaga-tenaga yang terampil guna menyikapi pelanggaran merek yang terjadi di lapangan. Hambatan yang dihadapi oleh Pemerintah kabupaten Pati baik secara internal maupun eksternal. Hambatan ini muncul dari pemilik merek itu sendiri selaku peohon. Selain itu kurangnya kesadaran pelaku usaha untuk mendaftarkan merek miliknya menjadi faktor utama dalam terhambatnya pendaftaran merek terasi hasil UMKM di Kecamatan Juwana, Kabupaten Pati.

Rekomendasi yang dapat diberikan dari penelitian ini adalah bagi pengusaha UMKM agar menentukan nama dan logo bagi mereknya sekreatif mungkin, agar menghindari kesamaan merek lain yang telah didaftarkan terlebih dahulu, memperbanyak pengetahuan tentang manfaat pendaftaran merek bagi perkembangan usaha Trasi Juwana yang diproduksinya dimasa depan.

Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Merek, Trasi Juwana, Upaya Hukum.

ABSTRACT

THE EFFORTS OF PATI DISTRICT GOVERNMENT IN PROVIDING LEGAL PROTECTION TO THE SHRIMP PASTE PRODUCT OF JUWANA BASED ON LAW NO. 15 OF 2001 ON BRAND

Shrimp paste product is categorized as a trade mark as included in article 1 point 2 of Law No. 15 of 2001 on Brand that explains the definition of trade mark, i.e.: the brand users in traded goods by someone or some people collectively or entities that distinguishes from other similar kind of products. Based on the provision, to get legal certainty on brand, the registration of a trade mark is required as the proof that the one who registers a brand for the first time gets recognition that the brand owned by him has legal power.

The research focus was on the extent of the legal protection to the famous trade mark of Juwana's shrimp paste based on the applicable law in Indonesia. Besides, it is necessary to find out the efforts that have been performed by the government to support the community, particularly the businesses of shrimp paste in Pati District to register their trademarks.

The approach method used in this research was the approach method of empirical-juridical, which is the research including the identification of unwritten law and the research on the effectiveness of the law. Socio-legal approach was used because this research presented the description that identified all existing issues based on the fact in public. It studied how the law worked in public using the techniques of interview and document study.

Based on the research results, it can be concluded that the efforts of Pati District Government in providing legal protection to implement brand registration in Pati District Government were as follows: 1) inviting other relevant institutions such as the Civil Servant Investigator (PPNS), the Indonesia Science Institution (LIPI), Indonesian National Police, and Prosecutors to perform the socialization on brand; 2) providing education and building to the entire staffs in the internal of the industry and trade agency (DISPERINDAG) so that it produced skillful staffs to deal with brand violations in the field. The obstructions faced by Pati District Government in the brand registration appeared from the brand owner as the applicants. In addition, businesses' lack of awareness to register their brands was the main factor of the obstruction in the registration of shrimp paste as the products of the Micro Small Medium Enterprises (UMKM) in the sub-district of Juwana, Pati District.

The recommendation provided in this research is that the businesses of the Micro Small Medium Enterprises (UMKM) should determine their brand names and logos as creative as possible to prevent the similarities with other brands which had initially been registered for the business development of Juwana's shrimp paste produced in the future.

Keywords: Legal Protection, Brand, Juwana's Shrimp paste, Pati District Government efforts starch.